

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah di Indonesia berkembang dengan pesat dan dapat menjadi pangsa pasar yang potensial dan menjanjikan dalam bisnis, hal ini dapat disebabkan oleh mayoritas penduduk di Indonesia yang beragama Islam. Perbankan syariah diproyeksikan akan meningkat semakin pesat seiring dengan meningkatnya laju ekspansi kelembagaan dan pertumbuhan aset perbankan syariah yang sangat tinggi.

Berikut adalah data peningkatan perbankan syariah di Indonesia.

Tabel 1.1

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Total Aset (dalam Miliar Rp)	195.018	242.276	272.343	296.262	356.504	401.452
Total Laba (dalam Miliar Rp)	2.466	3.230	1.733	1.786	2.096	3.081
Jumlah Bank	11	11	12	12	13	13

(Sumber: OJK (2017), Statistik Perbankan Syariah).

Tabel di atas menunjukkan tingkat perkembangan perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2012-2017. Dari segi total aset, pada tahun 2012 aset perbankan syariah berjumlah Rp. 195.018 Miliar, hal ini terus terjadi peningkatan setiap tahunnya, hingga tahun 2017 total aset pada perbankan syariah mencapai angka sebesar Rp. 401.452 Miliar atau meningkat sebesar 51,42% dari total aset tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perkembangan pesat dari segi total aset yang terjadi pada perbankan syariah di Indonesia. Dilihat dari segi total laba, pada tahun 2012 laba perbankan syariah berjumlah Rp. 2.466 Miliar kemudian meningkat di tahun 2013 menjadi Rp. 3.230 Miliar, tetapi pada tahun 2014 laba perbankan syariah mengalami penurunan hingga mencapai angka Rp. 1.733 Miliar atau menurun sebesar 42,29% dari laba tahun 2012. Ditahun 2015, laba perbankan syariah kembali

meningkat sebesar Rp. 1.786 Miliar dan terus terjadi peningkatan hingga pada tahun 2017 laba perbankan syariah angka mencapai Rp. 3.081 Miliar. Walaupun laba di tahun 2017 masih lebih kecil dari pada angka laba pada tahun 2013 tetapi perkembangan di tahun 2014-2017 menggambarkan tren positif dimana angka laba semakin meningkat di setiap tahunnya. Dari segi jumlah bank, bank umum syariah yang ada di Indonesia semakin bertambah. Pada tahun 2012 dan 2013 jumlah bank umum syariah 11 bank, pada tahun 2014 PT. BTPN syariah bergabung menjadi bank umum syariah sehingga jumlah bank umum syariah sebanyak 12 bank. Pada akhir tahun 2016, PT. Bank Aceh mengkonversikan diri menjadi PT. Bank Umum Syariah, dengan bergantinya PT. Bank Aceh Syariah menjadi bank umum syariah maka jumlah bank umum syariah yang ada di Indonesia menjadi 13 bank. Hingga akhir tahun 2017 bank umum syariah yang ada di Indonesia berjumlah 13 bank. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya dan akan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya. Dalam surat An-nisa ayat 29, dijelaskan bahwa transaksi dalam bisnis tidak boleh dilakukan dengan jalan yang bathil dan adanya keridhaan dalam melakukan transaksi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. An-Nisa' 4: Ayat 29)

Peningkatan keuangan dan kinerja yang terjadi di perusahaan digambarkan oleh manajemen lewat laporan keuangan yang diterbitkan. Laporan keuangan yang

disajikan oleh manajemen digunakan oleh para pembuat keputusan khususnya investor untuk melihat ekspansi bisnis perusahaan di masa yang akan mendatang dan memutuskan apakah perusahaan tersebut cukup menjanjikan untuk dijadikan lahan investasi atau tidak. Laporan keuangan menjadi yang lebih utama bagi setiap perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan mengenai pertanggungjawaban pihak manajemen.

Laporan keuangan dapat menggambarkan bagaimana dan sejauh mana perkembangan sebuah perusahaan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 menyatakan bahwa laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.¹ Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja perusahaan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi, ini merupakan suatu tujuan dari laporan keuangan.

Dalam laporan keuangan perusahaan memiliki informasi yang sangat penting untuk para pengguna laporan keuangan guna membuat keputusan yang memiliki konsekuensi ekonomi. Informasi pada laporan keuangan mestinya berkualitas tinggi dan menggambarkan kondisi perusahaan dengan sebenarnya. Laporan keuangan yang memiliki karakteristik dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan menurut Mahmudi ini yang dinyatakan dengan laporan keuangan yang berkualitas.² Ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi untuk memenuhi tujuannya merupakan karakteristik kualitas laporan keuangan. Karakteristik kualitas laporan keuangan meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.³

Laporan keuangan yang berkualitas menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas. Dalam laporan keuangan berkualitas yang dimaksud penyajian yang wajar yaitu penyajian secara jujur. Menurut Satriawan

¹ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015).

² Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 16.

³ Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik*, 106-107.

mudah untuk dipahami oleh pemakai, kesalahan material, informasi yang tidak menyesatkan, dan menyajikan secara jujur atau wajar tentang apa yang seharusnya disajikan, relevan serta dapat diperbandingkan merupakan suatu informasi yang berkualitas.⁴

Pandangan mengenai kualitas laporan keuangan dapat memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pihak yang mendefinisikannya, tetapi pada dasarnya Fanani menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan dapat diartikan dalam dua sudut pandang yang umum. Kualitas pelaporan keuangan berkaitan dengan kinerja bisnis perusahaan secara keseluruhan yang ditampilkan dalam pendapatan ini merupakan sudut pandang pertama. Sedangkan sudut pandang kedua yaitu pelaporan keuangan berhubungan dengan kinerja saham perusahaan di pasar modal.⁵

Sudut pandang pertama mengenai kualitas laporan keuangan yang berkaitan dengan kinerja perusahaan secara keseluruhan yang digambarkan dalam pendapatan sesuai pendapat Lev dan Thiagarajan yang menyatakan bahwa informasi pelaporan keuangan dikatakan berkualitas tinggi jika laba tahun berjalan bisa menjadi indikator laba di masa depan.⁶ Dechow dan Dichev dalam penelitiannya menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari laba tahun berjalan dapat memprediksi arus kas operasi masa depan.⁷ Kemudian kualitas laporan keuangan berhubungan dengan kinerja saham perusahaan di pasar modal ini merupakan pandangan kedua. Hal ini sesuai dengan pendapat Lev dan Thiagarajan yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari hubungan antara pendapatan dan pengembalian pasar yang kuat.⁸

⁴ Arief Setiawan, Jurnal Pengaruh Harga dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Ramayana. Vol. 14, No. 2, (2012), 11-13.

⁵ Zaenal Fanani, *Kualitas Pelaporan Keuangan: Faktor – Faktor Penentu dan Konsekuensi Ekonominya*, The 2nd Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, (4-5 November 2008), 2.

⁶ Lev, B. and R., Thiagarajan, *Fundamental Information Analysis*. Journal of Accounting Research, Vol. 31 No. 2, (1993), 190-215.

⁷ Dechow, P. and I. Dichev. *The Quality of Accruals and Earnings: The Role of Accrual Estimation Errors*. The Accounting Review, 77 (Supplement), (2002), 35-59.

⁸ Lev, B. and R., 190-215.

Cohen (2003), Francis et,al (2004) dan Pagalung (2006) dalam Fanani menyatakan bahwa penelitian mengenai kualitas laporan keuangan dapat dilakukan oleh dua pendekatan. Pertama, pendekatan yang berhubungan dengan investigasi faktor apa yang mengarah pada pelaporan keuangan yang berkualitas baik. Penelitian ini berhubungan dengan faktor intrisik perusahaan seperti spesifik perusahaan dan karakteristik perusahaan. Kedua, pendekatan yang berhubungan dengan melihat seberapa jauh kualitas laporan keuangan direspon oleh pengguna informasi.⁹ Penelitian ini berhubungan dengan faktor respon dan tanggapan pihak pengguna informasi keuangan apakah laporan keuangan yang disajikan perusahaan dapat mengurangi informasi asimetri sehingga pengguna laporan keuangan dapat menggunakannya untuk membuat keputusan ekonomi. Easley dan O'Hara menyatakan bahwa peningkatan kualitas informasi laporan keuangan akan mengurangi asimetri informasi.¹⁰

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang berhubungan dengan kualitas informasi laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak pengguna laporan keuangan mengenai faktor apa yang mempengaruhi manajemen untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Faktor yang akan digunakan adalah tata kelola perusahaan atau corporate governance. Norwani et.,al menyatakan bahwa tulang punggung penyusunan laporan keuangan adalah corporate governance dimana pelaporan keuangan menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam tata kelola perusahaan seperti manajemen termasuk dewan direksi, auditor, distributor informasi, analis dan pemegang saham. Inilah jembatan yang

⁹ Zaenal Fanani, Kualitas Pelaporan Keuangan: Faktor – Faktor Penentu dan Konsekuensi Ekonominya. The and Accounting Conference, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop Depok, (4-5 November 2008), 3.

¹⁰ Maureen Easley, D., and M. O'Hara, Information and the cost of capital. *Journal of Finance* 59, 1552-1583, 2004.

mengkomunikasikan perusahaan dengan pihak eksternal dan akan menjadi ukuran untuk menentukan kinerja atau hasil perusahaan.¹¹

Perusahaan dengan tata kelolaperusahaan yang baik akan memberikan dampak yang baik untuk kualitas informasi laporan keuangan. Ketika tata kelola perusahaan buruk, maka perusahaan akan melaporkan kegagalan dan sebisa mungkin perusahaan akan memanipulasi laporan keuangan mereka. Ada beberapa kasus manipulasi laporan keuangan yang disebabkan oleh buruknya tata kelola dalam sebuah perusahaan seperti kasus Enron, Lucent, Xerox, Rite Aid, Sunbeam, Waste Management, Global Crossing dan Worldcom yang melakukan manipulasi terhadap laporan keuangannya agar terlihat baik dan tetap diminati oleh para investor yang akhirnya berujung pada kebangkrutan. Kasus Enron Corporation pada tahun 2002 dimana perusahaan melaporkan keuntungan sebesar US \$600 juta yang pada kenyataannya perusahaan mengalami kerugian. Runtuhnya Enron telah menyebabkan sekitar \$70 miliar hilang dalam kapitalisasi pasar dan menghancurkan para investor, karyawan dan pensiunan.¹²

Worldcom menjadi salah satu perusahaan telekomunikasi raksasa dunia yang bangkrut pada tahun 2002 yang diakibatkan oleh manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Pada juni 2002 para auditor internal menjelaskan tentang penipuan laporan keuangan yang dilakukan kepada komite audit perusahaan. Lima hari setelahnya Worldcom mengumumkan secara terbuka bahwa telah meningkatkan laba lebih dari \$3,8 miliar. Setelah pengumuman dilakukan perdagangan saham perusahaan pada bursa saham dihentikan dan 21 juli 2002 perusahaan menyatakan pailit.

¹¹ Norlia Mat Norwani et.al, Corpotare Governance Failure and Its Impact On Financial Reporting Within Selected Companies, *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 2, No. 21, 205-213, (November 2011). 206.

¹² Khondaker Mizanur Rahman and Marc Bremer, Effective Corporate Governance And Financial Reporting In Japan, *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance (AAMJAF)* Vol. 12, Suppl. 1, 93–122, (2016), 94.

Pada perbankan syariah juga terdapat beberapa kasus mengenai kurangnya kualitas informasi yang disajikan oleh pihak manajemen. Endraswati dalam penelitiannya menyampaikan beberapa kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh perbankan syariah, yaitu kasus transaksi *derivative* (termasuk *gharar*) yang dilakukan oleh UUS Bank Danamon Tbk.¹³ Seperti yang diketahui bahwa transaksi *derivative* merupakan salah satu transaksi yang termasuk *gharar* atau transaksi yang mengandung unsur spekulasi yang diharamkan pada perbankan syariah. Kasus lainnya adalah kasus kredit sindikasi proyek Indosat Multimedia Mobile (IM3) yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri Syariah dan Unit Usaha Syariah BNI. Pada kasus ini perusahaan memperoleh bunga atas kredit tersebut sebesar 19% pertahun yang mana kita ketahui dalam perbankan syariah tidak boleh ada pemberian atau penerimaan bunga karena dikategorikan kedalam transaksi riba dan tidak sesuai dengan prinsip syariah.¹⁴ Pada perbankan syariah apabila terdapat transaksi-transaksi yang mengandung unsur yang diharamkan dan tidak sesuai prinsip syariah maka manajemen harus mengungkapkan dalam laporan keuangannya alasan transaksi tersebut dilakukan. Dan pendapatan yang diperoleh dari transaksi tersebut tidak bisa dimasukkan kedalam pendapatan bank. Pengawasan terhadap kasus seperti ini merupakan tugas dari dewan pengawas syariah.

Pada tahun 2017 PT. Bank Jabar Banten Syariah tersandung kasus kredit fiktif dan yang menjadi tersangka dalam kasus ini adalah Plt. Direktur Utama dari BJB Syariah saat itu. Dalam kasus ini bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT. HSK untuk membeli kios pada Garut Super Blok dengan plafond sebesar Rp. 566,45 miliar selama periode Oktober 2014 sampai dengan Juni 2015. Pada pemberian pembiayaan ini bank menggunakan akad murabahah dengan perjanjian apabila telah selesai pekerjaan akan di bayar tunai. Pada kasus ini, pemberian pembiayaan kepada

¹³ Hikmah Endraswati, Struktur Islamic Corporate Governance dan Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Bank Syariah di Indonesia Perspektif Governance dan Finance, LP2M-Press, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, (Juli 2017), 2.

¹⁴ Abrar Solikhin, Perkembangan Perbankan Syariah Mengkhawatirkan, Sangat Beresiko Menjalankan Prinsip Menyimpang dari Syariah, dimana Peran BI & Dewan Pengawas Syariah, Kompasiana.com, (Jakarta, 2009).

PT. HSK dilakukan dengan mengalihkan 161 debitur end user sebesar Rp. 566,45 miliar. Tetapi kenyataannya sebelum selesainya proyek tersebut uang telah dibayar terlebih dahulu maka terjadinya penggunaan uang kredit yang dipergunakan selain untuk pembangunan Garut Super Blok. Sehingga 161 debitur yang ada kualitas pembiayaannya macet dan dianggap tidak memenuhi persyaratan bank (tidak bankable) sehingga ada bagian yang fiktif. PT. HSK sebenarnya tidak ada memberikan suatu jaminan agunan sertifikat tanah induk pokok dan diduga debitur hanya direkayasa.¹⁵

Kasus kredit fiktif yang terjadi pada BRI Syariah tahun 2011, yaitu penggunaan fasilitas kredit dari BRI syariah cabang Serang, Banten kepada PT. Nagari Jaya Sentosa dan PT Java Artha Buana sebesar Rp. 226 miliar. Dimana kredit tersebut digunakan dalam rangka pembangunan pasar tradisional di Bantar Gebang, Bekasi pembangunan Plaza Nagari Pakubuwono, dan pembangunan Alea Cilandak Town House. Dani selaku ketua tim marketing PT. Nagari Jaya Sentosa bersama-sama dengan debitur dari PT. Nagari Jaya Sentosa, yaitu Amir Abdullah dan PT. Javana Arta Buana yaitu Muhammad Sarigus mengajukan kredit sebesar Rp. 226 miliar ke BRI syariah cabang Serang. Deni bertugas sebagai pengumpul dokumen 438 nasabah kemudian mengajukan kredit. Seolah-olah permohonan kredit tersebut diajukan guna pembelian ruko di daerah Cilandak, Jakarta Selatan. Tetapi setelah kreditnya cair uangnya tidak diperuntukkan sebagaimana proposal pengajuan. Diduga disalah gunakan oleh tersangka Deni bersama-sama debitur PT. Nagari Jaya Sentosa dan Javana Arta Buana. Tindakan ini merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 212 miliar.¹⁶

Kemudian kasus pada perbankan juga yaitu kasus fasilitas kredit Bank Mandiri kepada PT. Tirta Amanda Botting (PT. TAB). Kasus ini terus berlanjut, Bank Mandiri mengatakan ada dugaan bahwa PT. TAB sengaja memalsukan laporan

¹⁵ Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "Polisi Tetapkan Plt Dirut BJB Syariah Sebagai Tersangka Kasus Kredit Fiktif", NasionalKompas.com (Jakarta, 21 November 2017).

¹⁶ Nvc, Kasus Kredit Fiktif BRI Syariah, detiknews.com (Jakarta, 7 Oktober 2011).

keuangan agar mendapatkan fasilitas kredit. Ada dugaan PT. TAB mengubah laporan keuangan seolah-olah aktiva piutang dan persediaannya mengalami kenaikan. Manipulasi laporan ini dilakukan PT. TAB diduga untuk mendapatkan fasilitas tambahan kredit dari Bank Mandiri. Perubahan laporan keuangan tersebut diduga dilakukan oleh auditor PT. TAB.¹⁷

Kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar tersebut telah mengacaukan kepercayaan para pengguna laporan keuangan terhadap kualitas dan kehandalan dari sistem keuangan. Pihak manajemen yang menyusun laporan keuangan seharusnya memberikan informasi laporan keuangan yang berkualitas tinggi, sehingga dalam membuat keputusan ekonomi berpengaruh positif terhadap para pengguna laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan harus mudah dipahami oleh masyarakat luas. Tata kelola perusahaan yang buruk tidak hanya menghasilkan kualitas laporan keuangan yang buruk tetapi juga akan merugikan perusahaan dan memperbesar kemungkinan perusahaan untuk mengalami kebangkrutan.

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS tahun 2010 menyatakan bahwa transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional dan kewajaran merupakan lima prinsip yang melandaskan pelaksanaan tata kelola perusahaan pada perbankan syariah.¹⁸ Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan merupakan makna dari transparansi yang menjadi salah satu prinsip dari tata kelola perusahaan. Laporan keuangan sangat penting karena laporan tersebut merupakan salah satu bentuk informasi yang disajikan oleh perusahaan kemudian laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan, maka sangat diperlukan transparansi dalam penyajiannya. Semakin tinggi kualitas laporan keuangan maka semakin baik pula tata kelola dalam perusahaan.

¹⁷ Galvan Yudistira, "Kasus TAB Debitur Mandiri diduga Manipulasi Dana", Kontan.co.id (Jakarta, 25 September 2017).

¹⁸ Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS, Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, 2010.

Salah satu aspek tata kelola perusahaan yang berhubungan langsung dengan kualitas informasi laporan keuangan adalah komite audit. POJK No. 55/POJK.04/2015 komite audit bertugas melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan oleh pihak yang melakukan penawaran atau perusahaan publik kepada pihak lainnya yang terkait dengan informasi keuangan atau perusahaan publik.¹⁹ Agar pengawasan yang dilakukan oleh komite audit menjadi efektif dan informasi keuangan memiliki kualitas yang tinggi yang disajikan perusahaan serta memiliki keahlian yang tinggi mengenai akuntansi merupakan tugas komite audit dalam pelaksanaannya.

Dalam melaksanakan tugasnya komite audit harus memiliki keahlian yang tinggi mengenai akuntansi dan keuangan agar pengawasan yang dilakukan oleh komite audit menjadi efektif dan informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan memiliki kualitas yang tinggi. Arens menyatakan bahwa komite audit yang tidak efektif dalam melakukan pengawasan pelaporan keuangan disebabkan oleh penyimpangan dalam laporan keuangan.²⁰ Beberapa peneliti seperti Persons (2005) dan Qin (2007) melakukan penelitian tentang efektivitas komite audit dalam memantau proses pelaporan keuangan dan dari penelitian tersebut mereka menyimpulkan bahwa terdapat keterkaitan antara karakteristik komite audit dengan kualitas laporan keuangan.

Dalam tata kelola perusahaan untuk bank umum syariah, ada salah satu aspek yang membedakannya dengan tata kelola perusahaan pada perusahaan umum aspek dewan pengawas keuangan. Dewan pengawas syariah juga mempunyai hubungan langsung dengan kualitas informasi laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan yang tinggi pada bank syariah juga ditandai dengan pengungkapan unsur-unsur syariah dalam laporannya, manajemen yang menyusun laporan keuangan harus

¹⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

²⁰ Arens, Alvin & Elder, Randal. et.,al. *Jasa Audit dan Assurance*. (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 84.

mengungkapkan unsur-unsur yang tidak syariah yang nantinya akan mengurangi pendapatan perusahaan.

Salah satu tahap yang ada di dalam tugas dewan pengawas syariah adalah pengawasan (*supervising*). Mengawasi seluruh kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah ini merupakan peran dewan pengawas syariah. Menurut Dewayanto mekanisme *monitoring* manajemen perusahaan semakin baik jika jumlah dewan pengawas syariah semakin besar. Dengan meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan bank maka akan membuat jumlah dewan pengawas syariah semakin besar dalam sebuah perusahaan.²¹ Semakin baiknya tingkat pengawasan dewan pengawas syariah maka semakin baik pula kepatuhan akan prinsip syariah yang dilakukan oleh manajemen dan akan berdampak semakin tingginya kualitas laporan keuangan yang disajikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang judul “Pengaruh Efektivitas Komite Audit dan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Bank Umum Syariah Tahun 2013-2017”.

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan ini dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian:

1. Seberapa besar pengaruh efektivitas Komite Audit secara persial terhadap kualitas laporan keuangan pada bank umum syariah tahun 2013-2017?
2. Seberapa besar pengaruh pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara persial terhadap kualitas laporan keuangan pada bank umum syariah tahun 2013-2017?
3. Seberapa besar pengaruh efektivitas komite audit dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada bank umum syariah tahun 2013-2017?

²¹ Totok Dewayanto, Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perbankan Nasional Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008, *Fokus Ekonomi* Vol. 5 No. 2 104-123, (Desember 2010), 106.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh efektivitas komite audit terhadap kualitas laporan keuangan pada bank umum syariah tahun 2013-2017.
2. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap kualitas laporan keuangan pada bank umum syariah tahun 2013-2017.
3. Untuk mengetahui signifikansi secara simultan efektivitas komite audit dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap kualitas laporan keuangan pada bank umum syariah tahun 2013-2017.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara akademis maupun praktis:

1. Secara Akademis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi syariah mengenai efektivitas komite audit dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah serta pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.
 - b. Sebagai bahan tambahan kepustakaan untuk penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh efektivitas komite audit dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap kualitas laporan keuangan.
 - c. Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.
2. Secara Praktis
 - a. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, evaluasi dan saran kepada pihak manajemen agar dapat menyusun laporan keuangan dengan kualitas yang baik.

- b. Diharapkan dapat memberikan deskripsi mengenai efektivitas komite audit dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah serta pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.

